

Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan *Financial Literacy* bagi Guru-Guru Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur

Musdholifah¹, Ulil Hartono², Andre Dwijanto Witjaksono³

^{1,2,3}Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

¹musdholifah@unesa.ac.id

Received: 6 Februari 2019; Revised: 24 Juni 2019; Accepted: 4 Agustus 2019

Abstract

Education in Indonesia must be recognized as still far below the average of other developing countries when viewed in terms of quality. one of the causes, according to UNESCO is the factor of teaching staff or teachers. teacher professionalism should also be supported by adequate facilities and infrastructures. however, these ideal conditions are not always enjoyed by the calm of educators, especially teachers who are far from urban areas. As long as the teacher's professional ability has not been achieved ideally, the teacher should get training to enrich his knowledge. One important material in economic subjects at the high school level is material about money markets and capital markets. Changes in the capital market are so fast, often not well followed by teachers, especially those who are far from urban areas. Therefore it was arranged to bridge these needs. This activity was carried out with non-productive community groups, namely economic teachers. The method of implementing training uses lecture techniques and discussion. The training was conducted in two sessions. The first stage is understanding financial literacy. The second stage is socialization of the capital market and financial industry. The target to be achieved is the acquisition of knowledge and understanding of economic teachers about financial literacy. The results of this activity indicate an increase in the understanding of teachers related to financial literacy and financial institutions and the capital market as indicated by the increase in the value of tests obtained before and after receiving training. In addition, from this activity the teacher felt that he got very useful knowledge which they had not been able to obtain from the literature.

Keywords: *teachers, economy, capital market, financial services authority.*

Abstrak

Pendidikan di Indonesia harus diakui masih jauh berada di bawah rata-rata negara berkembang lain jika dilihat dari sisi kualitas. salah satu penyebabnya, menurut UNESCO adalah faktor tenaga pendidik atau guru. profesionalisme guru hendaknya juga didukung oleh memadainya sarana dan prasarana. namun, kondisi ideal tersebut tidak selalu dinikmati oleh tenaga pendidik khususnya guru yang berada jauh dari perkotaan. Selama kemampuan profesionalisme guru belum tercapai secara ideal maka guru seharusnya mendapatkan pelatihan guna memperkaya pengetahuannya. Salah satu materi penting dalam mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA adalah materi tentang pasar uang dan pasar modal. Perubahan-perubahan dalam pasar modal begitu cepat, seringkali tidak bisa diikuti dengan baik oleh para guru khususnya yang berada jauh dari perkotaan. Oleh karena itu disusun guna menjembatani kebutuhan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kelompok masyarakat non produktif yaitu guru-guru ekonomi. Metode pelaksanaan pelatihan

menggunakan teknik ceramah dan diskusi. Pelatihan dilaksanakan dalam dua sesi. Tahap pertama tentang pemahaman financial literacy. Tahap kedua yaitu sosialisasi tentang pasar modal dan industri keuangan. Target yang ingin dicapai adalah diperolehnya pengetahuan dan pemahaman guru-guru ekonomi tentang financial literacy. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman guru-guru terkait literasi keuangan dan lembaga keuangan serta pasar modal yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai tes yang diperoleh sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan. Selain itu dari kegiatan ini guru merasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang selama ini tidak dapat mereka peroleh dari literatur.

Kata Kunci: guru, ekonomi, pasar modal, otoritas jasa keuangan.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah member amanah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya. Hal ini tentunya memerlukan upaya terus menerus dan serius dari pemerintah. Harus diakui bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih belum baik.

Abad 21 disebut pula dengan abad pengetahuan karena pengetahuan menjadi landasan utama dan aspek kehidupan. Peran pendidik atau guru dalam era tersebut dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih guna menghadapi tuntutan tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga memungkinkan para peserta didik mampu mengakses informasi diluar apa yang diberikan oleh tenaga pendidik, sehingga guru dituntut untuk selalu meng-upgrade pengetahuan yang dimiliki.

Profesionalisme sebagai penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi kemampuan, minat dan bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru (Sumargi, 1996 dalam Hasan, 2001).

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat 651 Sekolah menengah Atas (SMA/ sederajat) baik negeri maupun swasta yang akad di

Nusa Tenggara Barat (NTB). Angka ini tersebar di beberapa wilayah dengan jumlah SMA mencapai 550 lembaga dan SMK sebanyak 110 lembaga. Dengan jumlah tersebut menjadi modal cukup besar bagi NTB untuk terus bergerak meningkatkan pembangunan manusianya khususnya di jalur edukasi. Bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menyambut kesempatan emas bonus demografi. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia maka bonus demografi akan memberikan kemajuan yang cukup tinggi. jika mampu memanfaatkan bonus demografi ini, maka akan berdampak terhadap pengurangan pengangguran, pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik, meningkatnya daya saing daerah dan bergerak lebih maju (Sudarwati, dkk., 2016).

Informasi terkait banyaknya jumlah lembaga pendidikan di NTB tersebut ternyata masih bertolak belakang dengan kenyataan yang ada, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat literasi keuangan di daerah tersebut. Asosiasi Perusahaan Pembayaran Indonesia (APPI) wilayah NTB menyesalkan masih rendahnya literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai konsumen (Septarini, 2016). Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh perusahaan keuangan di daerah lebih besar. Selain harus memenuhi target yang ditetapkan, perusahaan juga harus bisa memberikan edukasi kepada konsumennya. masyarakat perlu diberikan

Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Financial Literacy bagi Guru-Guru Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur

Musdholifah, Ulil Hartono, Andre Dwijanto Witjaksono

literasi keuangan tentang fungsi, kewajiban, dan haknya yang berkaitan dengan hukum dan finansial ketika mengajukan kredit pada perusahaan keuangan. Selain itu, perusahaan juga diminta terbuka dengan konsumen terkait proses perjanjian dan juga kontrak kredit yang disepakati dengan konsumen.

Menurut Yusrin (2017) berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2016, literasi keuangan di NTB masih rendah yaitu 22-23 persen dan merupakan yang terendah urutan tiga di Indonesia. Namun, di awal tahun 2017, posisi itu semakin turun. Dari total 36 Provinsi di Indonesia, NTB menduduki peringkat ke 35 dengan prosentase 21,45 persen. Berada satu tingkat diatas Provinsi Papua Barat dengan persentase 19,27 persen. Hasil survey menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan per provinsi menunjukkan bahwa provinsi NTB memiliki indeks inklusi (akses) keuangan sebesar 63,27%. Indeks ini diatas nilai rata-rata nasional. Namun, jika dilihat kesenjangan antara literasi dan inklusi menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 40%. Hal ini mengindikasikan bahwa akses keuangan telah banyak dilakukan oleh masyarakat NTB namun pemahaman tentang keuangan masih sangat rendah dan masyarakat dalam membeli produk dan jasa keuangan, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami karakteristik produk keuangan tersebut (OJK, 2017). Firmansyah (2017) juga menilai bahwa rendahnya literasi di NTB dapat menjadi indikasi sempitnya skala pasar di NTB. Menurutnya, jika skala pasar luas, secara tidak langsung pemahaman terhadap industri jasa keuangan juga akan semakin baik. Hal ini dapat dipahami karena membaiknya pemahaman tentang jasa keuangan akan berkaitan pula dengan penggunaan jasa keuangan sebagai perantara dalam melakukan transaksi dan bisnis.

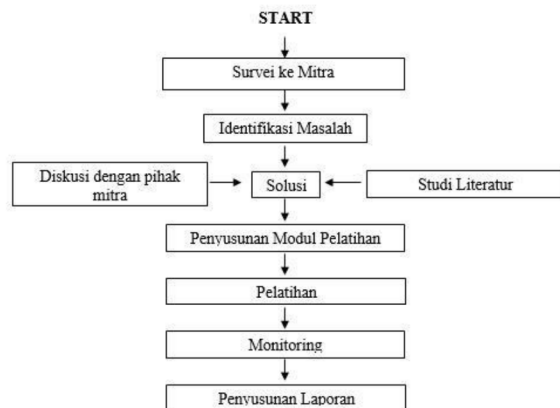
Terdapat setidaknya tiga hal yang dapat menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat literasi keuangan menurut Firmansyah (2017). Pertama, masyarakat memang tidak cukup memiliki ketersediaan uang untuk disimpan di perbankan sehingga

meskipun masyarakat paham peran jasa keuangan, tetap tidak akan mampu memiliki modal untuk melakukan transaksi. Kedua, pemahaman literasi tidak lepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat IPM NTB yang relatif rendah dapat menjadi indikasi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat terhadap pemahamannya tentang keuangan. Angka IPM di NTB hingga tahun 2015 menempati posisi 30 dari 34 provinsi ditahun 2015. Ketiga, terdapat substitusi atau pengganti dari jasa keuangan yang umumnya dilakukan oleh para rentenir.

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu wilayah di sisi timur pulau Lombok merupakan daerah yang jauh dari akses keuangan. Berdasarkan wawancara awal dengan para guru ekonomi, mereka belum pernah mendapatkan edukasi terkait dengan literasi keuangan. Padahal peran guru dalam mengajarkan dan mengenalkan literasi keuangan kepada anak didik sangat memegang peranan penting dalam penilaian tingkat literasi keuangan dalam masyarakat. Hal ini dapat dikatakan rendahnya tingkat literasi keuangan di Provinsi NTB menjadi bukti bahwa perkembangan lingkungan keuangan yang begitu pesat belum mampu diadopsi oleh dunia pendidikan. Faktor jarak dan jauhnya jangkauan guru daerah dari pusat informasi kadangkala menjadi kendala bagi para guru untuk melakukan up date keilmuan mereka. Rendahnya pemahaman tentang literasi keuangan dapat dijadikan alasan agar guru selalu meningkatkan kemampuan dan pemahamannya tentang literasi keuangan melalui kegiatan edukasi dan pelatihan agar kelak guru dapat mengajarkan kepada muridnya tentang literasi keuangan dan pemahaman tentang OJK dan industri keuangan di Indonesia. Berdasarkan gambaran diatas maka guru-guru ekonomi sangat mengharapkan adanya sosialisasi dan pelatihan terkait literasi keuangan, OJK dan Industri Keuangan di Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metode pelaksanaan kegiatan PKM Guru-guru Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur tertuang dalam Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan pelatihan menggunakan teknik ceramah dan diskusi. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Peserta pengabdian adalah guru-guru ekonomi SMA/MA Kabupaten Lombok Timur sebanyak 15 guru. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama tentang pemahaman financial literacy (literasi keuangan). Tahap kedua yaitu pengenalan atau sosialisasi tentang pasar modal dan industri keuangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan PKM bagi guru-guru ekonomi di kabupaten lombok timur diwujudkan melalui kegiatan dengan tema peningkatan kompetensi profesionalisme guru melalui pelatihan financial literacy bagi guru-guru ekonomi di kabupaten lombok timur. Tema pengabdian ini menjadi tema penting mengingat urgensinya untuk memahami literasi keuangan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian Kepada masyarakat di kabupaten Lombok Timur ini disajikan dalam tiga hal. pertama, persiapan pelaksanaan (Pra kegiatan), Kegiatan, dan Evaluasi kegiatan.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk menyiapkan kegiatan ini agar berjalan sesuai

dengan sasaran yang diharapkan. Tahap persiapan diawali dengan diskusi awal tim untuk pembagian materi pelatihan yang diberikan. Tahap persiapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi untuk menyiapkan materi ajar yang akan diberikan kepada guru-guru ekonomi yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Tahapan berikutnya setelah penyusunan materi adalah menyusun instrument tes untuk mengukur keefektifan kegiatan pelatihan yang nanti akan dilaksanakan.

2. Tahap Pelaksanaan

PKM di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada tanggal 3-5 Agustus 2018 dan bertempat di Gedung Sekolah SMAN 1 Selong Kabupaten Lombok Timur. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 15 orang guru. Kegiatan PKM dimulai pukul 09.00 Pagi dan diawali dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama diberikan oleh Direktur Pascasarjana Unesa yang selanjutnya di sambutan diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya peserta memasukkan ruang kelas untuk masuk ke sesi pelatihan.

Tahap awal pelaksanaan PKM peserta diminta untuk mengerjakan pre test sebanyak 20 soal dan diberikan waktu mengerjakan selama 15 menit. Acara dilanjutkan dengan sesi materi pertama yang diberikan oleh pemateri pertama yaitu Dr. Andre Dwijanto Witjaksono, ST, M.Si Materi yang diberikan adalah tentang literasi keuangan. Materi yang kedua terkait sosialisasi OJK, pasar modal dan Lembaga keuangan diberikan oleh Dr. Musdholifah, SE, M.Si. Peserta diberikan penjelasan secara teoritis terkait OJK, BI, pasar modal, instrument keuangan khususnya saham, reksadana, dan analisis saham, perasuransian Indonesia, dan praktek cerdas berinvestasi di lantai bursa saham.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi meliputi analisis keefektifan kegiatan PKM yang dilakukan dengan cara melihat perbedaan hasil skor yang diperoleh peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan PKM. Hasil dari sebelum

Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Financial Literacy bagi Guru-Guru Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur

Musdholifah, Ulil Hartono, Andre Dwijanto Witjaksono

dan sesudah mengikuti pelatihan, diperoleh hasil yang berbeda pada saat Pre Test peserta yang berjumlah 15 Guru memiliki nilai rata-rata 7,3 dan saat Post Tes nilai skor rata-rata guru peserta PKM meningkat menjadi 8,8.

Pembahasan

Pelaksanaan pelatihan dan pembelajaran lebih dekat kepada para guru mengenai informasi seputar Otoritas Jasa Keuangan dan Pasar Modal menunjukkan hasil yang memuaskan. Materi pokok yang diberikan antara lain mengenai:

1. Bank. Materi ini memuat pengertian bank, fungsi bank, jenis, prinsip kegiatan usaha dan produk bank.
2. Lembaga keuangan non bank. Materi ini terdiri atas pengertian lembaga keuangan bukan bank, fungsi lembaga keuangan bukan bank, jenis-jenis lembaga keuangan non bank antara lain pasar modal, pasar uang, asuransi.
3. Bank sentral. Materi bank sentral meliputi pengertian bank sentral, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia saat ini setelah munculnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stabilitas sistem keuangan.
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Materi OJK terdiri atas pengertian, fungsi, tugas dan wewenang OJK.

Semua guru memberikan apresiasi yang positif pada kegiatan PKM ini. Mereka merasa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, mengingat selama ini mereka masih buta dan bingung akan Informasi terkait eksistensi OJK, Bank Sentral dan Pasar Modal.

Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis keefektifan kegiatan PKM yang dilakukan terkait pemahaman guru-guru ekonomi Kabupaten Lombok Timur tentang literasi keuangan berdasarkan hasil survey melalui pre test dan post tes kami selama acara, menunjukkan hasil yang berbeda. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil pre test dan post tes pada Tabel 1.

Guru-guru Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur kurang memahami perkembangan sektor keuangan terutama tentang OJK, bank sentral, pasar modal dan

kelembagaan keuangan non bank. Selama kegiatan PKM berlangsung antusias guru-guru peserta PKM sangat tinggi, ini terbukti saat kegiatan berlangsung para peserta (Guru) tidak sedikit yang berusaha bertanya terkait OJK dan wewenang apa saja yang dimiliki OJK. Begitu juga guru-guru sangat memperhatikan dengan seksama saat menerima penjelasan terkait pasar modal bagaimana mekanisme trading (perdagangan saham) secara riil di bursa efek Indonesia. Peserta guru ekonomi Kabupaten Lombok Timur selain itu juga memberikan beberapa saran serta masukan kepada kami supaya mereka diberikan refreshing terkait materi-materi terbaru yang berhubungan dengan literasi keuangan supaya pengajaran yang mereka lakukan tidak ketinggalan informasi. hal ini dikarenakan buku teks SMA yang para guru pegang kurang lengkap dalam memebrikan informasi terkait literasi keuangan.

Tabel 1. Hasil Skor Pre Tes Dan Post Tes

No	Nama Peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
1	Saupiyanti, S.Pd.	70	90
2	Tri Pangastuti, S.Pd.	70	90
3	Laili Faridah, S.Pd.	75	90
4	B. Rahmi Yunita, S.Pd.	70	90
5	Haerudin, S.Pd.	75	90
6	Rusmiatun	75	85
7	Lalu Muhammad Abdullah, S.Pd.	80	95
8	Mohamad Sapii, S.Pd.	75	85
9	Rahmi Hayai, S.Pd.	75	90
10	Rohiyana Astuti, M.Pd.	70	90
11	Hj. Dra. Rahayu Eko Cahyowati	65	85
12	B. Evi Aprian Sutanti, S.E.	80	95
13	H. Drs. Sasapudian	75	85
14	Jamhur Nune Pasti	70	85
15	Syaifuddin	70	85

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa para guru Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur sangat memerlukan akses yang lebih luas terkait materi-materi pengajaran tentang literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan program yang dilakukan oleh OJK dan Bank

Sentral serta Bursa Efek Indonesia terkait dalam melakukan sosialisasi literasi keuangan terutama bagi guru dan siswa sekolah baik di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah lainnya.

Keadaan tersebut dapat dimaklumi disebabkan terjadinya perubahan pada sistem moneter dan keuangan di Indonesia yang menuntut para guru untuk mengupdate pengetahuannya, terkait informasi literatur tentang keberadaan kelembagaan OJK dan Pasar Modal meskipun untuk akses informasi tersebut masih terbilang minim.

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK merupakan lembaga pengawas bank dan lembaga keuangan non-bank yang keberadaan baru disahkan tahun 2011. Sebelumnya munculnya OJK, pengawasan sektor perbankan dibawah pengawasan Bank Indonesia selaku bank sentral, sedangkan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank diawasi dan diatur oleh Bapepam-LK (Badan Pengawas dan Pelaksana Pasar Modal dan Lembaga Keuangan).

Dikarena keberadaan OJK yang masih baru itu yang kemudian menjadi kendala bagi tenaga pengajar saat mengakses informasi terkait lembaga tersebut. Terutama tenaga pengajar yang kebetulan berada di daerah yang jauh dari lokasi kantor OJK maupun pasar modal. Ketertarikan para peserta atas kegiatan Pelatihan dan pembelajaran ini dapat diukur dari antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung yang ditunjukkan dari banyaknya jumlah penanya dalam setiap sesi kegiatan yang mengungkapkan keingintahuan mereka seputar OJK, Bank Sentral dan pasar modal. Berdasarkan hasil kegiatan yang kami lakukan diakhir kegiatan PKM ini peserta merasa puas atas kegiatan pelatihan dan pembelajaran ini. Selain itu para peserta juga memberikan masukan antara lain mereka merasa perlu adanya kegiatan lanjutan yang serupa terkait up date informasi, bagi para guru terutama para guru yang berada di daerah yang sifatnya berkala perlu dilaksanakan.

D. PENUTUP

Simpulan

Kegiatan PKM ini ditujukan untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada para guru Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur terkait materi tentang OJK, Bank Sentral dan Pasar Modal. Metode kegiatan ini adalah mula-mula para guru diminta untuk mengerjakan pre-test sebanyak 20 soal dan diberikan waktu mengerjakan selama 15 menit dari hasil pre tes didapat nilai skor rata-rata guru sebesar 7,3. Acara dilanjutkan diisi dengan sesi materi, materi pertama tentang literasi keuangan. Selanjutnya diberikan materi terkait OJK, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Setelah diberi pelatihan dan pembelajaran terkait materi, para peserta diminta mengisi post tes, dari hasil post tes didapat peningkatan nilai rata-rata skor sebesar 8,8. Peningkatan nilai rata-rata skor dari pra tes dan post tes menunjukkan bahwa pelatihan dan pembelajaran materi-materi tentang OJK, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada kegiatan PKM ini berhasil memberikan pengetahuan, ilmu dan informasi terbaru kepada para guru-guru di Kabupaten Lombok Timur.

Hasil dari kegiatan PKM ini guru-guru merasa puas karena telah mendapatkan banyak informasi terkait OJK, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para guru untuk memperluas pemahaman mereka tentang pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan serta dapat dijadikan memasukkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya.

Saran

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan PKM ini adalah bagi para guru diharapkan untuk selalu meningkatkan kompetensinya dengan rajin mengikuti kegiatan pelatihan baik yang diberikan pihak sekolah maupun pihak luar. Bagi pelaksana, agar kedepan dapat dibuat kegiatan yang serupa bagi guru-guru di daerah lain terutama yang jauh dari ibukota Propinsi karena disinyalir mereka juga menghadapi permasalahan yang serupa.

Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Financial Literacy bagi Guru-Guru Ekonomi di Kabupaten Lombok Timur

Musdholifah, Ulil Hartono, Andre Dwijanto Witjaksono

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan dana untuk kegiatan PKM di Lombok Timur.

E. DAFTAR PUSTAKA

Septarini, E. C. 2016. *Dialog Interaktif Sinergitas Antara APPI, OJK, Kepolisian, dan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa A antara Pelaku Usaha dan Konsumen Mataram* pada tanggal 29 September 2016.

Sudarwati., Sofiah, S., dan Ida Kintamani, I. 2016. *Analisis Kinerja Pendidikan*

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Yusrin. 2017. *Hasil Survei tingkat literasi Keuangan di NTB 2016. Materi disampaikan dalam Diskusi Lakuk Pandai*, diselenggarakan oleh Bank BTPN kerjasama dengan Terbitan Sindo, 23 Januari 2017.

Saukah, A. dan Waseso, M. G. 2000. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah*. Malang: UM Press.

www.ojk.go.id diakses tanggal 11 Juli 2018.